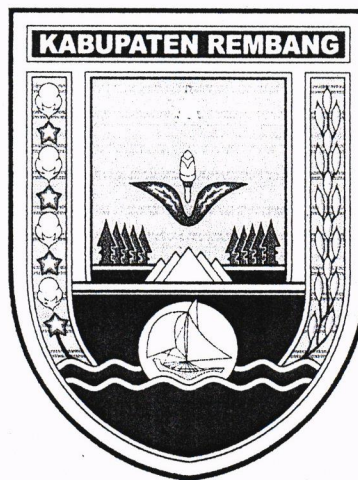


RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 30 JULI 2019



TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN KUPA/ PPAS PERUBAHAN APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2019

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194

Rembang 59212



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
R E M B A N G

RISALAH

PERSETUJUAN RANCANGAN KUPA/ PPAS PERUBAHAN APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2019

Hari : Selasa
Tanggal : 30 Juli 2019
Waktu : 10.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT:**
1. Pembukaan;
 2. Laporan Banggar atas Hasil Pembahasan Rancangan KUPA/ PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2019;
 3. Persetujuan Rancangan KUPA/ PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2019;
 4. Penandatanganan Kesepakatan Bersama;
 5. Penutup.
- IV. **PIMPINAN RAPAT**
1. Nama : H. Majid Kamil MZ
 2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang
- V. **SEKRETARIS RAPAT**
1. Nama : Drs. DRUPODO, M.Si.
 2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	: 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 8 orang
2. Fraksi Demokrat	: 3 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 3 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 7 orang
5. Fraksi Gerindra	: 3 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 3 orang
7. Fraksi Harapan	: 2 orang
Jumlah	: 29 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 2 orang
2. Fraksi Demokrat	: 5 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 3 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 1 orang
5. Fraksi Gerindra	: 2 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 1 orang
7. Fraksi Harapan	: 2 orang
Jumlah	: 16 orang

IX. JALANNYA RAPAT

PIMPINAN RAPAT : H. Majid Kamil. MZ

LAGU INDONESIA RAYA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat

- Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang saya hormati

- Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang,
- Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang,
- Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda beserta Kepala Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Rembang,
- Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Rembang,
- Camat se Kabupaten Rembang serta para undangan dan hadirin yang berbahagia.

Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan nikmat, taufiq dan rahmat-Nya kita dapat menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka Persetujuan dan Kesepakatan Bersama KUPA-PPAS Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019.

Sebelum memulai Rapat Paripurna ini, saya mengucapkan Selamat Hari Jadi Kabupaten Rembang yang ke-278, semoga dengan bertambah usia, bertambah sejahtera masyarakatnya dengan semangat inovatif dan kreatif menggali potensi serta mendorong investasi di Kabupaten Rembang.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Pada Pasal 107 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang menyebutkan bahwa *“Rapat Paripurna DPRD untuk menetapkan Peraturan Daerah dan APBD memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD ”.*

➤ Interupsi Sdr. Puji Santoso, S.P.,M.H. (Fraksi Gerindra)

“ Maaf Pimpinan ini jumlah anggota secara fisik baru 29 orang dan belum kuorum jadi saya minta untuk ditunda dulu rapatnya agar kuorum. Terima kasih.”

➤ Sdr. Muh. Asnawi (Fraksi PKB)

“ Mohon Pimpinan untuk tatibnya untuk dicek lagi apakah untuk persetujuan KUPA/ PPAS itu 2/3 atau cukup $\frac{1}{2}$ plus 1???”

➤ H. Majid Kamil MZ(Pimpinan Rapat)

“ Mohon untuk Sekretaris Dewan untuk bisa membantu menjelaskan.”

➤ Drs. Drupodo, M.Si. (Sekretaris Dewan)

“ Mohon ijin Pimpinan untuk menjelaskan, pada pasal 107 Peraturan DPRD tahun 2019

a) $\frac{3}{4}$ untuk hak angket, pemberhentian Bupati/ Wakil Bupati;

b) $\frac{2}{3}$ untuk persetujuan raperda;

c) Dan $\frac{1}{2}$ plus 1 untuk selain yang tersebut pada poin (a) dan (b).

Jadi ini termasuk dalam poin (c) cukup $\frac{1}{2}$ plus 1.”

➤ H. Majid Kamil MZ(Pimpinan Rapat)

“ Oke jadi kita setuju ya cukup $\frac{1}{2}$ plus 1 , jadi ini sudah kuorum

Adapun menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 29 orang. Dengan demikian, keabsahan kuorum dalam Rapat Paripurna hari ini telah terpenuhi.

Selanjutnya dengan mengucapkan “*Bismillahirrohmanirrohim*” tepat pukul 14.45 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka.

(ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Pada Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama.

Melalui surat Bupati Rembang Nomor : 050/1907/2019 188.3/2380/2018 tanggal 8 Juli 2019 dan surat Nomor 050/1908/2019 tanggal 8 Juli 2019 telah disampaikan Rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020, serta Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 sekaligus permintaan pembahasan kepada DPRD Kabupaten Rembang.

Menindaklanjuti hal tersebut, oleh DPRD Kabupaten Rembang melalui Badan Musyawarah, pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 setelah pelaksanaan rapat paripurna dalam membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018, dilakukan rapat bersama dengan TAPD Kabupaten Rembang untuk menetapkan jadwal pembahasannya. Dengan memperhatikan jadwal dan agenda yang ditetapkan, selanjutnya akan saya bacakan susunan acara yang menjadi agenda dalam rapat paripurna hari ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;

2. Laporan Badan Anggaran atas Rancangan KUPA – PPAS Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019;
3. Persetujuan KUPA - PPAS Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019;
4. Penandatanganan Nota Kesepakatan bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD;
5. Penutup.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Kita masuk acara kedua, yaitu Laporan Badan Anggaran atas Rancangan KUPA – PPAS Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019.

Kepada Saudara Drs. Drupodo, M.Si. , saya minta untuk berkenan menyampaikannya. Dipersilahkan.

===== PENYAMPAIAN LAPORAN BANGGAR =====

➤ (*Laporan Badan Anggaran atas Rancangan KUPA – PPAS Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 terlampir*)

Terimakasih Saudara Drs. Drupodo, M.Si. atas bantuannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Demikian penyampaian laporan Badan Anggaran terhadap Rancangan KUPA - PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019. Apakah nantinya Rancangan KUPA-PPAS Perubahan yang baru saja disampaikan Badan Anggaran dapat diterima dan disetujui menjadi KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, tergantung dari pengambilan keputusan anggota dalam rapat paripurna ini. Kepada rekan-rekan anggota, oleh karena KUPA-PPAS Perubahan 2019 adalah sebagai pedoman dalam

penyusunan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2019, maka saya minta untuk lebih cermat dalam memberikan persetujuan.

➤ Interupsi Sdr. Muh. Asnawi (Fraksi PKB)

“ Maaf Pimpinan terkait himbuan untuk pencermatan bahwa kami merasa keberatan terkait rencana kenaikan tali asih pada kepala desa yang sudah purna tugas, ini terjadi kenaikan yang mencapai 300 % dan ini menurut kami tidak realistis daripada tahun sebelumnya. Dimana hal ini disampaikan ke Komisi A lewat Bagian Tata Pemerintahan hanya 15 juta dan hasil akhir jadi 20juta, ini seperti muncul tiba - tiba. Ini juga belum ada dasar hukumnya terkait jumlah nominalnya, toh masih banyak belanja publik yang perlu dibenahi dan saya rasa akan lebih berguna jika digunakan untuk pemabangunan di Kabupaten Rembang. Terima kasih “

➤ H. Majid Kamil MZ(Pimpinan Rapat)

“ Maaf Pak Asnawi ini perlu pencermatan lanjutan nanti Pak Drupodo bisa memberikan penjelasan apakah dana tali asih ini muncul tiba – tiba atau tidak. Silahkan Pak Sekwan”

➤ Drs. Drupodo, M.Si. (Sekretaris Dewan)

“ Mohon ijin Pimpinan jadi struktur KUPA/ PPAS 2019 masuk dibelanja di Dinpermades.”

➤ Interupsi Sdr. Muh. Asnawi (Fraksi PKB)

“ Maaf ini ada yang aneh dalam rapat dengan Komisi A yang menyampaikan Bagian Tata Pemerintahan tapi masuknya kok ke Dinpermades Komisi D”

➤ H. Majid Kamil MZ(Pimpinan Rapat)

“ Oke. Gimana ini mungkin Komisi D bisa menanggapi, silahkan Mas Henry.”

➤ Interupsi Sdr. Henry Purwoko (Fraksi PPP)

“ Terima kasih Pimpinan, ini gini waktu rapat dengan Dinpermades saya taunya ada dana monitoring untuk pembangunan 180 desa @ 50 juta. Tapi

saya kaget kok dana tali asih yang menyampaikan bagian Tapem ke komisi A tapi dalam struktur KUPA masuk ke Dinpermades. Tapi kalau dana itu untuk perangkat desa itu bukan wewenang kami selama ini kami mendukung untuk kegiatan dana desa untuk kegiatan monitoring.”

➤ Interupsi Sdr. Muh. Asnawi (Fraksi PKB)

“ Sebentar Pimpinan ini saya kira salah pos anggaran apa tidak,...ini dominya bagian Tapem atau Dinpermades?? Terima Kasih “

➤ H. Majid Kamil MZ(Pimpinan Rapat)

“ Ini begini saja saya tawarkan ke semua anggota yang hadir disini kita sepakati dan cermati pada waktu pembahasan RAPBD Perubahan 2019 saja , apakah kita sepakati apa tidak. Bagaimana apakah setuju????”

➤ Semua anggota yang hadir

“ setujuuuuu.....!!!!!!”

➤ H. Majid Kamil MZ(Pimpinan Rapat)

“Oke rapat saya lanjutkan kembali “

Saya tawarkan kepada Saudara-saudara dalam rapat paripurna ini :

“ Apakah Laporan Badan Anggaran atas Rancangan KUPA - PPAS Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019, dapat disetujui dan disepakati menjadi KUPA - PPAS Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 ?”

===== SETUJU =====

(Ketuk palu 1 kali)

Terimakasih kepada rekan-rekan anggota, atas persetujuannya. Dari persetujuan ini, selanjutnya akan diteruskan dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Bupati dengan Pimpinan DPRD.

Agar prosesi penandatanganan berjalan lancar, saya minta kepada sekretariat DPRD untuk memandu jalannya prosesi.
Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Sekretariat DPRD.

===== PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

=====

Terimakasih kepada Sekretariat DPRD atas waktunya.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Agenda acara dalam rapat paripurna telah kita lalui, maka selesai sudah acara rapat paripurna hari ini. Terima kasih kepada Saudara Bupati dan Wakil Bupati, rekan-rekan Anggota, Sekretaris DPRD beserta seluruh stafnya yang telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, sehingga pembahasan KUPA-PPAS Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 dapat berjalan lancar.

Akhirnya dengan mengucapkan “ *Alhamdulillahirobbil ‘alamin* “ tepat pukul 15.30 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Sekian.

Wabilla Hitaufik Walhidayah, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

KETUA ,


H. MAJID KAMIL MZ

SEKRETARIS,


Drs. DRUPODO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670421 199303 1 009

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA INTERNAL DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG PERSETUJUAN
RANCANGAN KUPA/ PPAS PERUBAHAN TAHUN
2019**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Forum koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD dan Camat Se Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Laporan Banggar atas Hasil Pembahasan KUPA/ PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2019
- LAMPIRAN III : Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang Nomor11..... Tahun 2019 tentang Persetujuan Rancangan KUPA/ PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2019.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

**LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN REMBANG
ATAS PEMBAHASAN RANCANGAN KUPA-PPAS PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2019**



**BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2019**

**LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RAPAT PARIPURNA HARI SELASA TANGGAL 30 JULI 2019
MEMBAHAS KUPA-PPAS TAHUN ANGGARAN 2019**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang Terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang saya hormati

- Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
- Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang
- Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda beserta Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Rembang
- Kepala OPD se Kabupaten Rembang
- Camat se Kabupaten Rembang serta para undangan dan hadirin semua yang berbahagia.

Berikut kami bacakan laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang tentang Pembahasan KUPA-PPAS Perubahan APBD TA. 2019.

I. PENDAHULUAN :

1. bahwa Rancangan KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 sebelum disepakati menjadi KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2019 dilakukan pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD dan TAPD;
2. bahwa hasil pembahasan Rancangan KUPA PPAS Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 dilaporkan oleh Badan Anggaran pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.

II. D A S A R.

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;
10. Surat Bupati Rembang Nomor 050/1908/2019 tanggal 8 Juli 2019 perihal Penyampaian Rancangan KUPA dan PPAS P Kabupaten Rembang TA. 2019;
11. Hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang dengan TAPD Pemerintah Kabupaten Rembang tanggal 8 Juli 2019 yang mengagendakan Pembahasan KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2019.

III. PELAKSANAAN

- a. Rapat Badan Anggaran dengan TAPD Kabupaten Rembang dilakukan pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019 Pukul 09.00. WIB. dengan agenda penjelasan KUA/PPAS Tahun 2020 dan KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2019.
- b. Rapat Badan Anggaran dengan Pimpinan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Rembang dilakukan pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019 Pukul 13.00.WIB, dalam rangka membahas Strategi penyiapan materi masukan tentang KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2019.
- c. Rapat – rapat Komisi A,B,C,D DPRD dengan SKPD / Instansi terkait dilaksanakan pada :
H a r i : Senin - Rabu.
Tanggal : 22 s/d 24 Juli 2019.
Jam : 14.00 WIB.

Acara : Membahas Materi masukan kepada Banggar tentang KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2019.

d. Rapat Badan Anggaran dengan Pimpinan Komisi-Komisi DPRD pada :

H a r i : Kamis

Tanggal : 25 Juli 2019.

Jam : 09.00. WIB.

Tempat : Ruang Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang.

Acara : Penyampaian masukan Komisi kepada Banggar tentang KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2019.

e. Rapat Badan Anggaran DPRD dengan TAPD Kabupaten Rembang :

H a r i : Senin

Tanggal : 29 Juli 2019.

Jam : 10.00. WIB.

Tempat : Ruang Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang.

Acara : Sinkronisasi hasil pembahasan KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2019.

IV. HASIL RAPAT

Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang telah melakukan pembahasan Rancangan KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2019, sebagaimana jadwal yang telah ditentukan. Adapun ringkasannya dapat dijabarkan sebagai berikut :

HASIL PEMBAHASAN KUPA - PPAS PERUBAHAN 2019

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)		PEMBAHASAN		
		APBD INDIUK 2019	KUPA PPAS PERUBAHAN 2019	PERSETUJUAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG) DARI INDIUK 2019	BERTAMBAH (BERKURANG) DARI USULAN PERUBAHAN
1	2	3	4	6	7 = 6-3	8 = 6-4
1	PENDAPATAN DAERAH	1,785,139,506,071.00	1,854,400,154,071.00	1,862,109,419,071.00	76,969,913,000.00	7,709,265,000.00
1.01	Pendapatan Asli Daerah	291,855,438,071.00	302,892,327,071.00	310,601,592,071.00	18,746,154,000.00	7,709,265,000.00
1.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	96,850,500,000.00	100,522,250,000.00	100,522,250,000.00	3,671,750,000.00	-
1.01.02	Hasil Retribusi Daerah	23,158,499,000.00	24,102,329,000.00	24,102,329,000.00	943,830,000.00	-
1.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10,030,000,000.00	10,840,309,000.00	10,840,309,000.00	810,309,000.00	-
1.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	161,816,439,071.00	167,427,439,071.00	175,136,704,071.00	13,320,265,000.00	7,709,265,000.00
1.02	Dana Perimbangan	1,086,414,856,000.00	1,090,338,415,000.00	1,090,338,415,000.00	3,923,559,000.00	-
1.02.01	Dana Transfer Umum	842,646,897,000.00	846,570,456,000.00	846,570,456,000.00	3,923,559,000.00	-
1.02.02	Dana Transfer Khusus	243,767,959,000.00	243,767,959,000.00	243,767,959,000.00	-	-
1.03	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	406,869,212,000.00	461,169,412,000.00	461,169,412,000.00	54,300,200,000.00	-
1.03.01	Pendapatan Hibah	58,432,800,000.00	58,993,000,000.00	58,993,000,000.00	560,200,000.00	-
1.03.03	Dana Bagi Hasil Pajak dari pemerintah Provinsi dan pemerintah daerah lainnya	90,000,000,000.00	106,030,000,000.00	106,030,000,000.00	16,030,000,000.00	-
1.03.04	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	258,436,412,000.00	258,436,412,000.00	258,436,412,000.00	-	-
1.03.05	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	37,710,000,000.00	37,710,000,000.00	37,710,000,000.00	-
2.	BELANJA DAERAH	1,827,508,350,914.00	1,923,224,416,557.19	1,930,933,681,611.19	103,425,330,697.19	7,709,265,054.00
2.01	Belanja Tidak Langsung	1,144,037,719,205.00	1,157,703,763,202.00	1,151,306,363,256.19	7,268,644,051.19	(6,397,399,945.81)
2.01.01	Belanja Pegawai	693,272,542,605.00	687,167,329,979.00	679,834,930,033.19	(13,437,612,571.81)	(7,332,399,945.81)
2.01.02	Belanja Bunga	1,131,632,000.00	1,131,632,000.00	1,631,632,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00
2.01.04	Belanja Hibah	48,064,900,000.00	55,843,292,000.00	55,358,292,000.00	7,293,392,000.00	(485,000,000.00)
2.01.05	Belanja Bantuan Sosial	7,284,660,000.00	7,964,660,000.00	8,094,660,000.00	810,000,000.00	130,000,000.00
2.01.06	Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	11,944,474,900.00	15,499,474,900.00	16,684,474,900.00	4,740,000,000.00	1,185,000,000.00
2.01.07	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota Pemerintahan Desa dan Partai Politik	381,339,509,700.00	388,820,509,700.00	388,425,509,700.00	7,086,000,000.00	(395,000,000.00)
2.01.08	Belanja Tidak Terduga	1,000,000,000.00	1,276,864,623.00	1,276,864,623.00	276,864,623.00	-
						-

2.02	Belanja Langsung	683,470,631,709.00	765,520,653,355.19	779,627,318,355.00	96,156,686,646.00	14,106,664,999.81
	Jumlah Belanja	1,827,508,350,914.00	1,923,224,416,557.19	1,930,933,681,611.19	103,425,330,697.19	7,709,265,054.00
	surplus (devisit)	(42,368,844,843.00)	(68,824,262,486.19)	(68,824,262,540.19)	(26,455,417,697.19)	(54.00)
3.	PEMBIAYAAN DAERAH					
3.01	Penerimaan Pembiayaan	49,237,212,843.00	75,692,630,486.19	155,692,630,540.19	106,455,417,697.19	80,000,000,054.00
3.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)	49,237,212,843.00	75,692,630,486.19	75,692,630,540.19	26,455,417,697.19	54.00
	Penerimaan Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah Dari Lembaga Keuangan Bank			80,000,000,000.00	80,000,000,000.00	80,000,000,000.00
	Jumlah penerimaan Pembiayaan	49,237,212,843.00	75,692,630,486.19	155,692,630,540.19	106,455,417,697.19	80,000,000,054.00
3.02	Pengeluaran Pembiayaan	6,868,368,000.00	6,868,368,000.00	86,868,368,000.00	-	80,000,000,000.00
3.02.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	-	-
3.02.03	Pembayaran pokok utang	3,868,368,000.00	3,868,368,000.00	3,868,368,000.00	-	-
	Pembayaran Hutang Jangka Pendek BLUD	-	-	80,000,000,000.00		80,000,000,000.00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	6,868,368,000.00	6,868,368,000.00	86,868,368,000.00	-	80,000,000,000.00
	Pembiayaan Netto	42,368,844,843.00	68,824,262,486.19	68,824,262,540.19	26,455,417,697.19	54.00
3.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	-	0.00	0.00	0.00	-

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA SKPD KUPA-PPAS PERUBAHAN 2019

NO.	SKPD	APBD INDUK 2019		
		BELANJA		
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
1	2	3	4	5=3+4
1	DINPENDIKPORA	442,785,947,225.00	99,526,937,850.00	542,312,885,075.00
2	DINAS KESEHATAN	58,360,932,641.00	92,360,724,600.00	150,721,657,241.00
3	RSUD dr R. SOETRASNO	28,049,877,300.00	100,719,696,000.00	128,769,573,300.00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8,522,953,150.00	81,201,165,000.00	89,724,118,150.00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	13,323,957,750.00	17,655,939,440.00	30,979,897,190.00
6	SATPOL PP	6,323,578,200.00	7,461,556,000.00	13,785,134,200.00
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	3,304,683,900.00	1,532,100,000.00	4,836,783,900.00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2,989,771,050.00	5,034,100,000.00	8,023,871,050.00
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	6,532,820,250.00	12,829,964,000.00	19,362,784,250.00
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	4,943,505,650.00	5,016,070,000.00	9,959,575,650.00
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	20,194,567,150.00	50,037,244,519.00	70,231,811,669.00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8,274,225,550.00	7,574,400,000.00	15,848,625,550.00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3,434,890,233.00	3,183,786,000.00	6,618,676,233.00
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	390,682,501,350.00	4,303,306,000.00	394,985,807,350.00
15	DINAS PERHUBUNGAN	5,647,905,350.00	16,965,780,000.00	22,613,685,350.00
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2,388,806,950.00	5,800,290,000.00	8,189,096,950.00
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	2,898,878,600.00	5,537,805,000.00	8,436,683,600.00
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2,883,365,600.00	10,637,700,000.00	13,521,065,600.00
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	4,275,616,500.00	15,185,608,000.00	19,461,224,500.00
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	10,487,662,022.00	14,930,272,000.00	25,417,934,022.00
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	19,884,881,000.00	-	19,884,881,000.00
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	771,327,550.00	-	771,327,550.00
23	SETDA	29,797,768,550.00	33,771,080,000.00	63,568,848,550.00
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	14,568,000,000.00	15,526,000,000.00	30,094,000,000.00
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	-	778,580,000.00	778,580,000.00
c	SETDA (BAGIAN UMUM)	15,229,768,550.00	7,103,000,000.00	22,332,768,550.00
d	SETDA (BAGIAN HUMAS)	-	4,245,000,000.00	4,245,000,000.00
e	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	-	2,005,200,000.00	2,005,200,000.00
f	SETDA (BAGIAN HUKUM)	-	945,000,000.00	945,000,000.00
g	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	-	2,063,300,000.00	2,063,300,000.00
h	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	-	1,105,000,000.00	1,105,000,000.00
24	SEKRETARIAT DPRD	4,706,626,338.00	38,919,572,000.00	43,626,198,338.00
25	KECAMATAN REMBANG	5,737,821,800.00	4,087,146,600.00	9,824,968,400.00
26	KECAMATAN KALIORI	2,304,363,400.00	847,890,000.00	3,152,253,400.00
27	KECAMATAN SULANG	2,299,972,250.00	1,016,450,000.00	3,316,422,250.00
28	KECAMATAN SUMBER	2,198,830,500.00	660,072,500.00	2,858,903,000.00
29	KECAMATAN BULU	2,091,557,800.00	814,924,000.00	2,906,481,800.00
30	KECAMATAN LASEM	2,421,238,850.00	879,590,000.00	3,300,828,850.00
31	KECAMATAN PANCUR	2,436,189,100.00	746,360,000.00	3,182,549,100.00
32	KECAMATAN SLUKE	1,544,609,200.00	768,147,500.00	2,312,756,700.00
33	KECAMATAN PAMOTAN	1,870,432,250.00	841,600,000.00	2,712,032,250.00
34	KECAMATAN GUNEM	1,724,823,900.00	674,560,000.00	2,399,383,900.00
35	KECAMATAN SALE	1,738,018,250.00	811,764,000.00	2,549,782,250.00
36	KECAMATAN KRAGAN	2,513,109,238.00	1,632,088,500.00	4,145,197,738.00
37	KECAMATAN SEDAN	2,201,440,250.00	739,839,000.00	2,941,279,250.00
38	KECAMATAN SARANG	2,467,538,100.00	1,398,250,000.00	3,865,788,100.00
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	4,558,777,850.00	6,324,470,000.00	10,883,247,850.00
40	BAPPEDA	3,673,469,700.00	7,520,000,000.00	11,193,469,700.00
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	16,617,406,958.00	15,971,113,000.00	32,588,519,958.00
a	(SKPD)	15,617,406,958.00	15,971,113,000.00	31,588,519,958.00
b	(PPKD)	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00
42	BKD	4,171,069,950.00	7,551,270,200.00	11,722,340,150.00
	JUMLAH	1,144,037,719,205.00	683,470,631,709.00	1,827,508,350,914.00

REKAPITULASI ANGGARAN E

NO.	SKPD	RANCANGAN KUPA PPAS PERUBAHAN 2019		
		BELANJA		
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
1	2	9	10	11=9+10
1	DINPENDIKPORA	438,941,183,648.00	152,963,250,738.00	591,904,434,386.00
2	DINAS KESEHATAN	58,905,829,452.00	97,467,002,370.00	156,372,831,822.00
3	RSUD dr R. SOETRASNO	28,193,928,325.00	106,148,819,392.04	134,342,747,717.04
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8,461,285,319.00	97,139,108,400.00	105,600,393,719.00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	14,284,424,179.00	12,900,549,640.00	27,184,973,819.00
6	SATPOL PP	6,472,649,393.00	5,553,456,000.00	12,026,105,393.00
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	3,219,346,049.00	1,542,408,000.00	4,761,754,049.00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3,098,123,731.00	5,012,100,000.00	8,110,223,731.00
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	6,792,538,073.00	12,884,964,000.00	19,677,502,073.00
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	4,825,695,281.00	4,966,070,000.00	9,791,765,281.00
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	19,704,103,426.00	47,684,844,519.00	67,388,947,945.00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8,442,005,921.00	8,009,550,000.00	16,451,555,921.00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3,250,144,338.00	3,183,786,000.00	6,433,930,338.00
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	393,848,808,409.00	5,273,306,000.00	399,122,114,409.00
15	DINAS PERHUBUNGAN	5,301,683,436.00	15,690,780,000.00	20,992,463,436.00
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2,637,710,728.00	5,422,297,000.00	8,060,007,728.00
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	2,904,552,865.00	8,602,805,000.00	11,507,357,865.00
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2,690,799,903.00	10,574,595,000.00	13,265,394,903.00
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	5,453,354,148.00	15,179,612,700.00	20,632,966,848.00
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	10,599,837,890.00	15,541,997,000.00	26,141,834,890.00
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	21,213,274,000.00	-	21,213,274,000.00
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	770,756,324.00	-	770,756,324.00
23	SETDA	42,674,656,012.00	37,463,080,000.00	80,137,736,012.00
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	18,512,000,000.00	17,196,000,000.00	35,708,000,000.00
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	-	928,580,000.00	928,580,000.00
c	SETDA (BAGIAN UMUM)	15,201,656,012.00	7,665,000,000.00	22,866,656,012.00
d	SETDA (BAGIAN HUMAS)	-	4,255,000,000.00	4,255,000,000.00
e	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	8,961,000,000.00	2,005,200,000.00	10,966,200,000.00
f	SETDA (BAGIAN HUKUM)	-	1,045,000,000.00	1,045,000,000.00
g	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	-	3,163,300,000.00	3,163,300,000.00
h	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	-	1,205,000,000.00	1,205,000,000.00
24	SEKRETARIAT DPRD	4,669,402,442.00	37,922,885,000.00	42,592,287,442.00
25	KECAMATAN REMBANG	5,925,978,669.00	6,830,862,600.00	12,756,841,269.00
26	KECAMATAN KALIORI	2,197,389,706.00	894,890,000.00	3,092,279,706.00
27	KECAMATAN SULANG	2,038,315,616.00	1,163,450,000.00	3,201,765,616.00
28	KECAMATAN SUMBER	1,980,376,895.00	702,572,500.00	2,682,949,395.00
29	KECAMATAN BULU	1,826,913,497.00	857,424,000.00	2,684,337,497.00
30	KECAMATAN LASEM	2,313,334,620.00	925,090,000.00	3,238,424,620.00
31	KECAMATAN PANCUR	2,058,174,207.00	796,360,000.00	2,854,534,207.00
32	KECAMATAN SLUKE	1,612,199,136.00	807,647,500.00	2,419,846,636.00
33	KECAMATAN PAMOTAN	1,683,852,659.00	887,100,000.00	2,570,952,659.00
34	KECAMATAN GUNEM	1,582,178,054.00	725,060,000.00	2,307,238,054.00
35	KECAMATAN SALE	1,715,598,330.00	899,439,000.00	2,615,037,330.00
36	KECAMATAN KRAGAN	2,044,404,323.00	1,657,963,500.00	3,702,367,823.00
37	KECAMATAN SEDAN	1,910,612,681.00	839,389,000.00	2,750,001,681.00
38	KECAMATAN SARANG	2,408,604,080.00	1,403,225,000.00	3,811,829,080.00
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	4,104,779,083.00	7,279,470,000.00	11,384,249,083.00
40	BAPPEDA	3,635,155,011.00	7,663,481,340.15	11,298,636,351.15
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	17,034,204,914.00	16,710,243,156.00	33,744,448,070.00
a	(SKPD)	15,757,340,291.00	16,710,243,156.00	32,467,583,447.00
b	(PPKD)	1,276,864,623.00	-	1,276,864,623.00
42	BKD	4,275,598,429.00	7,349,719,000.00	11,625,317,429.00
	JUMLAH	1,157,703,763,202.00	765,520,653,355.19	1,923,224,416,557.19

REKAPITULASI ANGGARAN E

NO.	SKPD	BERTAMBAH (BERKURANG)		
		BELANJA		
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
1	2	13=9-5	14=10-6	15=13+14
1	DINPENDIKPORA	(3,844,763,577.00)	53,436,312,888.00	49,591,549,311.00
2	DINAS KESEHATAN	544,896,811.00	5,106,277,770.00	5,651,174,581.00
3	RSUD dr R. SOETRASNO	144,051,025.00	5,429,123,392.04	5,573,174,417.04
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	(61,667,831.00)	15,937,943,400.00	15,876,275,569.00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	960,466,429.00	(4,755,389,800.00)	(3,794,923,371.00)
6	SATPOL PP	149,071,193.00	(1,908,100,000.00)	(1,759,028,807.00)
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	(85,337,851.00)	10,308,000.00	(75,029,851.00)
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	108,352,681.00	(22,000,000.00)	86,352,681.00
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	259,717,823.00	55,000,000.00	314,717,823.00
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	(117,810,369.00)	(50,000,000.00)	(167,810,369.00)
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	(490,463,724.00)	(2,352,400,000.00)	(2,842,863,724.00)
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	167,780,371.00	435,150,000.00	602,930,371.00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	(184,745,895.00)	-	(184,745,895.00)
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3,166,307,059.00	970,000,000.00	4,136,307,059.00
15	DINAS PERHUBUNGAN	(346,221,914.00)	(1,275,000,000.00)	(1,621,221,914.00)
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	248,903,778.00	(377,993,000.00)	(129,089,222.00)
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	5,674,265.00	3,065,000,000.00	3,070,674,265.00
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	(192,565,697.00)	(63,105,000.00)	(255,670,697.00)
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1,177,737,648.00	(5,995,300.00)	1,171,742,348.00
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	112,175,868.00	611,725,000.00	723,900,868.00
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	1,328,393,000.00	-	1,328,393,000.00
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	(571,226.00)	-	(571,226.00)
23	SETDA	12,876,887,462.00	3,692,000,000.00	16,568,887,462.00
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	3,944,000,000.00	1,670,000,000.00	5,614,000,000.00
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	-	150,000,000.00	150,000,000.00
c	SETDA (BAGIAN UMUM)	(28,112,538.00)	562,000,000.00	533,887,462.00
d	SETDA (BAGIAN HUMAS)	-	10,000,000.00	10,000,000.00
e	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	8,961,000,000.00	-	8,961,000,000.00
f	SETDA (BAGIAN HUKUM)	-	100,000,000.00	100,000,000.00
g	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	-	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
h	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	-	100,000,000.00	100,000,000.00
24	SEKRETARIAT DPRD	(37,223,896.00)	(996,687,000.00)	(1,033,910,896.00)
25	KECAMATAN REMBANG	188,156,869.00	2,743,716,000.00	2,931,872,869.00
26	KECAMATAN KALIORI	(106,973,694.00)	47,000,000.00	(59,973,694.00)
27	KECAMATAN SULANG	(261,656,634.00)	147,000,000.00	(114,656,634.00)
28	KECAMATAN SUMBER	(218,453,605.00)	42,500,000.00	(175,953,605.00)
29	KECAMATAN BULU	(264,644,303.00)	42,500,000.00	(222,144,303.00)
30	KECAMATAN LASEM	(107,904,230.00)	45,500,000.00	(62,404,230.00)
31	KECAMATAN PANCUR	(378,014,893.00)	50,000,000.00	(328,014,893.00)
32	KECAMATAN SLUKE	67,589,936.00	39,500,000.00	107,089,936.00
33	KECAMATAN PAMOTAN	(186,579,591.00)	45,500,000.00	(141,079,591.00)
34	KECAMATAN GUNEM	(142,645,846.00)	50,500,000.00	(92,145,846.00)
35	KECAMATAN SALE	(22,419,920.00)	87,675,000.00	65,255,080.00
36	KECAMATAN KRAGAN	(468,704,915.00)	25,875,000.00	(442,829,915.00)
37	KECAMATAN SEDAN	(290,827,569.00)	99,550,000.00	(191,277,569.00)
38	KECAMATAN SARANG	(58,934,020.00)	4,975,000.00	(53,959,020.00)
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	(453,998,767.00)	955,000,000.00	501,001,233.00
40	BAPPEDA	(38,314,689.00)	143,481,340.15	105,166,651.15
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	416,797,956.00	739,130,156.00	1,155,928,112.00
a	(SKPD)	139,933,333.00	739,130,156.00	879,063,489.00
b	(PPKD)	276,864,623.00	-	276,864,623.00
42	BKD	104,528,479.00	(201,551,200.00)	(97,022,721.00)
	JUMLAH	13,666,043,997.00	82,050,021,646.19	95,716,065,643.19

REKAPITULASI ANGGARAN E

NO.	SKPD	PEMBAHASAN		
		PERSETUJUAN		
		BELANJA		
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
1	2	17	18	19=17+18
1	DINPENDIKPORA	431,756,523,648.00	153,065,750,738.00	584,822,274,386.00
2	DINAS KESEHATAN	58,905,829,452.00	100,501,267,370.00	159,407,096,822.00
3	RSUD dr R. SOETRASNO	28,693,928,325.00	110,648,819,392.00	139,342,747,717.00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8,461,285,319.00	99,639,108,400.00	108,100,393,719.00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	14,414,424,179.00	12,890,549,640.00	27,304,973,819.00
6	SATPOL PP	6,472,649,393.00	5,583,456,000.00	12,056,105,393.00
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	3,179,346,049.00	1,542,408,000.00	4,721,754,049.00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3,098,123,731.00	5,212,100,000.00	8,310,223,731.00
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	6,792,538,073.00	12,829,964,000.00	19,622,502,073.00
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	4,825,695,281.00	4,966,070,000.00	9,791,765,281.00
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	19,084,103,426.00	48,629,844,519.00	67,713,947,945.00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8,442,005,921.00	8,189,550,000.00	16,631,555,921.00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3,250,144,338.00	3,183,786,000.00	6,433,930,338.00
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	394,638,808,409.00	5,405,806,000.00	400,044,614,409.00
15	DINAS PERHUBUNGAN	5,301,683,436.00	15,640,780,000.00	20,942,463,436.00
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2,612,710,728.00	5,429,797,000.00	8,042,507,728.00
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	2,884,552,865.00	8,717,805,000.00	11,602,357,865.00
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2,690,799,903.00	10,574,595,000.00	13,265,394,903.00
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	5,218,354,148.00	15,179,612,700.00	20,397,966,848.00
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	10,599,837,890.00	15,857,497,000.00	26,457,334,890.00
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	21,213,274,000.00	-	21,213,274,000.00
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	770,756,324.00	-	770,756,324.00
23	SETDA	43,029,656,012.00	38,685,080,000.00	81,714,736,012.00
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	18,667,000,000.00	17,206,000,000.00	35,873,000,000.00
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	-	978,580,000.00	978,580,000.00
c	SETDA (BAGIAN UMUM)	15,201,656,012.00	7,790,000,000.00	22,991,656,012.00
d	SETDA (BAGIAN HUMAS)	-	4,255,000,000.00	4,255,000,000.00
e	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	9,161,000,000.00	2,005,200,000.00	11,166,200,000.00
f	SETDA (BAGIAN HUKUM)	-	1,095,000,000.00	1,095,000,000.00
g	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	-	4,150,300,000.00	4,150,300,000.00
h	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	-	1,205,000,000.00	1,205,000,000.00
24	SEKRETARIAT DPRD	4,669,402,442.00	37,922,885,000.00	42,592,287,442.00
25	KECAMATAN REMBANG	5,925,978,669.00	6,880,862,600.00	12,806,841,269.00
26	KECAMATAN KALIORI	2,197,389,706.00	894,890,000.00	3,092,279,706.00
27	KECAMATAN SULANG	2,038,315,616.00	1,143,450,000.00	3,181,765,616.00
28	KECAMATAN SUMBER	1,980,376,895.00	702,572,500.00	2,682,949,395.00
29	KECAMATAN BULU	1,826,913,497.00	877,424,000.00	2,704,337,497.00
30	KECAMATAN LASEM	2,313,334,620.00	925,090,000.00	3,238,424,620.00
31	KECAMATAN PANCUR	2,058,174,207.00	796,360,000.00	2,854,534,207.00
32	KECAMATAN SLUKE	1,612,199,136.00	807,647,500.00	2,419,846,636.00
33	KECAMATAN PAMOTAN	1,683,852,659.00	887,100,000.00	2,570,952,659.00
34	KECAMATAN GUNEM	1,582,178,054.00	725,060,000.00	2,307,238,054.00
35	KECAMATAN SALE	1,715,598,330.00	899,439,000.00	2,615,037,330.00
36	KECAMATAN KRAGAN	2,044,404,323.00	1,657,963,500.00	3,702,367,823.00
37	KECAMATAN SEDAN	1,910,612,681.00	839,389,000.00	2,750,001,681.00
38	KECAMATAN SARANG	2,408,604,080.00	1,433,225,000.00	3,841,829,080.00
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	4,104,779,083.00	7,679,470,000.00	11,784,249,083.00
40	BAPPEDA	3,635,155,011.00	7,905,981,340.00	11,541,136,351.00
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	16,986,464,968.19	16,657,743,156.00	33,644,208,124.19
a	(SKPD)	15,709,600,345.19	16,657,743,156.00	32,367,343,501.19
b	(PPKD)	1,276,864,623.00	-	1,276,864,623.00
42	BKD	4,275,598,429.00	7,617,119,000.00	11,892,717,429.00
	JUMLAH	1,151,306,363,256.19	779,627,318,355.00	1,930,933,681,611.19

REKAPITULASI ANGGARAN E

NO.	SKPD	PEMBAHASAN		
		BERTAMBAH (BERKURANG)		
		BELANJA		
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
1	2	21=17-5	22=18-6	23=21+22
1	DINPENDIKPORA	(11,029,423,577.00)	53,538,812,888.00	42,509,389,311.00
2	DINAS KESEHATAN	544,896,811.00	8,140,542,770.00	8,685,439,581.00
3	RSUD dr R. SOETRASNO	644,051,025.00	9,929,123,392.00	10,573,174,417.00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	(61,667,831.00)	18,437,943,400.00	18,376,275,569.00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1,090,466,429.00	(4,765,389,800.00)	(3,674,923,371.00)
6	SATPOL PP	149,071,193.00	(1,878,100,000.00)	(1,729,028,807.00)
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	(125,337,851.00)	10,308,000.00	(115,029,851.00)
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	108,352,681.00	178,000,000.00	286,352,681.00
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	259,717,823.00	-	259,717,823.00
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	(117,810,369.00)	(50,000,000.00)	(167,810,369.00)
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	(1,110,463,724.00)	(1,407,400,000.00)	(2,517,863,724.00)
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	167,780,371.00	615,150,000.00	782,930,371.00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	(184,745,895.00)	-	(184,745,895.00)
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3,956,307,059.00	1,102,500,000.00	5,058,807,059.00
15	DINAS PERHUBUNGAN	(346,221,914.00)	(1,325,000,000.00)	(1,671,221,914.00)
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	223,903,778.00	(370,493,000.00)	(146,589,222.00)
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	(14,325,735.00)	3,180,000,000.00	3,165,674,265.00
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	(192,565,697.00)	(63,105,000.00)	(255,670,697.00)
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	942,737,648.00	(5,995,300.00)	936,742,348.00
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	112,175,868.00	927,225,000.00	1,039,400,868.00
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	1,328,393,000.00	-	1,328,393,000.00
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	(571,226.00)	-	(571,226.00)
23	SETDA	13,231,887,462.00	4,914,000,000.00	18,145,887,462.00
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	4,099,000,000.00	1,680,000,000.00	5,779,000,000.00
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	-	200,000,000.00	200,000,000.00
c	SETDA (BAGIAN UMUM)	(28,112,538.00)	687,000,000.00	658,887,462.00
d	SETDA (BAGIAN HUMAS)	-	10,000,000.00	10,000,000.00
e	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	9,161,000,000.00	-	9,161,000,000.00
f	SETDA (BAGIAN HUKUM)	-	150,000,000.00	150,000,000.00
g	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	-	2,087,000,000.00	2,087,000,000.00
h	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	-	100,000,000.00	100,000,000.00
24	SEKRETARIAT DPRD	(37,223,896.00)	(996,687,000.00)	(1,033,910,896.00)
25	KECAMATAN REMBANG	188,156,869.00	2,793,716,000.00	2,981,872,869.00
26	KECAMATAN KALIORI	(106,973,694.00)	47,000,000.00	(59,973,694.00)
27	KECAMATAN SULANG	(261,656,634.00)	127,000,000.00	(134,656,634.00)
28	KECAMATAN SUMBER	(218,453,605.00)	42,500,000.00	(175,953,605.00)
29	KECAMATAN BULU	(264,644,303.00)	62,500,000.00	(202,144,303.00)
30	KECAMATAN LASEM	(107,904,230.00)	45,500,000.00	(62,404,230.00)
31	KECAMATAN PANCUR	(378,014,893.00)	50,000,000.00	(328,014,893.00)
32	KECAMATAN SLUKE	67,589,936.00	39,500,000.00	107,089,936.00
33	KECAMATAN PAMOTAN	(186,579,591.00)	45,500,000.00	(141,079,591.00)
34	KECAMATAN GUNEM	(142,645,846.00)	50,500,000.00	(92,145,846.00)
35	KECAMATAN SALE	(22,419,920.00)	87,675,000.00	65,255,080.00
36	KECAMATAN KRAGAN	(468,704,915.00)	25,875,000.00	(442,829,915.00)
37	KECAMATAN SEDAN	(290,827,569.00)	99,550,000.00	(191,277,569.00)
38	KECAMATAN SARANG	(58,934,020.00)	34,975,000.00	(23,959,020.00)
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	(453,998,767.00)	1,355,000,000.00	901,001,233.00
40	BAPPEDA	(38,314,689.00)	385,981,340.00	347,666,651.00
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	369,058,010.19	686,630,156.00	1,055,688,166.19
a	(SKPD)	92,193,387.19	686,630,156.00	778,823,543.19
b	(PPKD)	276,864,623.00	-	276,864,623.00
42	BKD	104,528,479.00	65,848,800.00	170,377,279.00
	JUMLAH	7,268,644,051.19	96,156,686,646.00	103,425,330,697.19

REKAPITULASI ANGGARAN E

NO.	SKPD	PEMBAHASAN		
		BERTAMBAH (BERKURANG)		
		BELANJA		
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
1	2	25=17-9	26=18-10	27=25+26
1	DINPENDIKPORA	(7,184,660,000.00)	102,500,000.00	(7,082,160,000.00)
2	DINAS KESEHATAN	-	3,034,265,000.00	3,034,265,000.00
3	RSUD dr R. SOETRASNO	500,000,000.00	4,499,999,999.96	4,999,999,999.96
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	130,000,000.00	(10,000,000.00)	120,000,000.00
6	SATPOL PP	-	30,000,000.00	30,000,000.00
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	(40,000,000.00)	-	(40,000,000.00)
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	200,000,000.00	200,000,000.00
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	-	(55,000,000.00)	(55,000,000.00)
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	-	-	-
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	(620,000,000.00)	945,000,000.00	325,000,000.00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	180,000,000.00	180,000,000.00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	790,000,000.00	132,500,000.00	922,500,000.00
15	DINAS PERHUBUNGAN	-	(50,000,000.00)	(50,000,000.00)
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	(25,000,000.00)	7,500,000.00	(17,500,000.00)
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	(20,000,000.00)	115,000,000.00	95,000,000.00
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	-	-
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	(235,000,000.00)	-	(235,000,000.00)
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	-	315,500,000.00	315,500,000.00
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-
23	SETDA	355,000,000.00	1,222,000,000.00	1,577,000,000.00
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	155,000,000.00	10,000,000.00	165,000,000.00
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	-	50,000,000.00	50,000,000.00
c	SETDA (BAGIAN UMUM)	-	125,000,000.00	125,000,000.00
d	SETDA (BAGIAN HUMAS)	-	-	-
e	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	200,000,000.00	-	200,000,000.00
f	SETDA (BAGIAN HUKUM)	-	50,000,000.00	50,000,000.00
g	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	-	987,000,000.00	987,000,000.00
h	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	-	-	-
24	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-
25	KECAMATAN REMBANG	-	50,000,000.00	50,000,000.00
26	KECAMATAN KALIORI	-	-	-
27	KECAMATAN SULANG	-	(20,000,000.00)	(20,000,000.00)
28	KECAMATAN SUMBER	-	-	-
29	KECAMATAN BULU	-	20,000,000.00	20,000,000.00
30	KECAMATAN LASEM	-	-	-
31	KECAMATAN PANCUR	-	-	-
32	KECAMATAN SLUKE	-	-	-
33	KECAMATAN PAMOTAN	-	-	-
34	KECAMATAN GUNEM	-	-	-
35	KECAMATAN SALE	-	-	-
36	KECAMATAN KRAGAN	-	-	-
37	KECAMATAN SEDAN	-	30,000,000.00	30,000,000.00
38	KECAMATAN SARANG	-	400,000,000.00	400,000,000.00
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	-	242,499,999.85	242,499,999.85
40	BAPPEDA	-	(52,500,000.00)	(100,239,945.81)
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	(47,739,945.81)	(52,500,000.00)	(100,239,945.81)
a	(SKPD)	(47,739,945.81)	(52,500,000.00)	(100,239,945.81)
b	(PPKD)	-	-	-
42	BKD	-	267,400,000.00	267,400,000.00
	JUMLAH	(6,397,399,945.81)	14,106,664,999.81	7,709,265,054.00

PROYEKSI PEMBIAYAAN RANCANGAN KUPA-PPAS PERUBAHAN 2019

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH (BERKURANG)	PEMBAHASAN			KETERANGAN
		APBD INDUK 2019	KUPA PPAS PERUBAHAN 2019		PERSETUJUAN	BERTAMBAH (BERKURANG)	BERTAMBAH (BERKURANG)	
1	2	3	4	5 = 4-3	6	7 = 6-3	8 = 6-4	9
3.1	Penerimaan Pembiayaan	49,237,212,843.00	75,692,630,486.19	26,455,417,643.19	155,692,630,540.19	106,455,417,697.19	80,000,000,054.00	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)	49,237,212,843.00	75,692,630,486.19	26,455,417,643.19	75,692,630,540.19	26,455,417,697.19	54.00	
	Penerimaan Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah Dari Lembaga Keuangan Bank				80,000,000,000.00	80,000,000,000.00	80,000,000,000.00	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	49,237,212,843.00	75,692,630,486.19	26,455,417,643.19	155,692,630,540.19	106,455,417,697.19	80,000,000,054.00	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	6,868,368,000.00	6,868,368,000.00	-	86,868,368,000.00	80,000,000,000.00	80,000,000,000.00	
3.2.2	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	-	3,000,000,000.00	-	-	
3.2.3	Pembayaran pokok utang	3,868,368,000.00	3,868,368,000.00	-	3,868,368,000.00	-	-	
	Pembayaran Hutang Jangka Pendek				80,000,000,000.00	80,000,000,000.00	80,000,000,000.00	
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6,868,368,000.00	6,868,368,000.00	-	86,868,368,000.00	80,000,000,000.00	80,000,000,000.00	

PROYEKSI PEMBIAYAAN RANCANGAN KUPA-PPAS PERUBAHAN 2019

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH (BERKURANG)	PEMBAHASAN			KETERANGAN
		APBD INDIK 2019	KUPA PPAS PERUBAHAN 2019		PERSETUJUAN	BERTAMBAH (BERKURANG)	BERTAMBAH (BERKURANG)	
1	2	3	4	5 = 4-3	6	7 = 6-3	8 = 6-4	9
3.1	Penerimaan Pembiayaan	49,237,212,843.00	75,692,630,486.19	26,455,417,643.19	155,692,630,540.19	106,455,417,697.19	80,000,000,054.00	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)	49,237,212,843.00	75,692,630,486.19	26,455,417,643.19	75,692,630,540.19	26,455,417,697.19	54.00	
	Penerimaan Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah Dari Lembaga Keuangan Bank				80,000,000,000.00	80,000,000,000.00	80,000,000,000.00	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	49,237,212,843.00	75,692,630,486.19	26,455,417,643.19	155,692,630,540.19	106,455,417,697.19	80,000,000,054.00	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	6,868,368,000.00	6,868,368,000.00	-	86,868,368,000.00	80,000,000,000.00	80,000,000,000.00	
3.2.2	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	-	3,000,000,000.00	-	-	
3.2.3	Pembayaran pokok utang	3,868,368,000.00	3,868,368,000.00	-	3,868,368,000.00	-	-	
	Pembayaran Hutang Jangka Pendek				80,000,000,000.00	80,000,000,000.00	80,000,000,000.00	
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6,868,368,000.00	6,868,368,000.00	-	86,868,368,000.00	80,000,000,000.00	80,000,000,000.00	

BELANJA
REKAPITULASI BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO.	ORGANISASI	JUMLAH (Rp)							
		APBD INDIK 2019							
		Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten /Kota dan Pemerintah Desa	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	Belanja Tidak Terduga	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 3+4+5+6+7+8+9
1	DINPENDIKPORA	419,709,047,225.00			23,076,900,000.00		6,050,000,000.00		442,785,947,225.00
2	DINAS KESEHATAN	53,310,932,641.00							53,310,932,641.00
3	RSUD dr R. SOETRASNO	26,918,245,300.00	1,131,632,000.00						28,049,877,300.00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8,522,953,150.00							8,522,953,150.00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4,936,457,750.00			2,975,000,000.00	5,412,500,000.00			13,323,957,750.00
6	SATPOL PP	6,323,578,200.00					1,090,966,000.00		6,323,578,200.00
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1,483,727,900.00			730,000,000.00				3,304,683,900.00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2,989,771,050.00							2,989,771,050.00
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	5,160,660,250.00				1,372,160,000.00			6,532,820,250.00
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	4,943,505,650.00							4,943,505,650.00
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	13,779,567,150.00			6,415,000,000.00				20,194,567,150.00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8,274,225,550.00							8,274,225,550.00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3,434,890,233.00							3,434,890,233.00
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3,539,472,750.00		11,944,474,900.00			375,198,553,700.00		390,682,501,350.00
15	DINAS PERHUBUNGAN	5,647,905,350.00							5,647,905,350.00
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2,388,806,950.00							2,388,806,950.00
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	2,813,878,600.00			85,000,000.00				2,898,878,600.00
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2,883,365,600.00							2,883,365,600.00
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3,685,616,500.00			590,000,000.00				4,275,616,500.00
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	10,362,662,022.00			125,000,000.00				10,487,662,022.00
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	19,884,881,000.00							19,884,881,000.00
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	771,327,550.00			14,068,000,000.00	500,000,000.00			29,797,768,550.00
23	SETDA	15,229,768,550.00			14,068,000,000.00	500,000,000.00			14,568,000,000.00
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)								
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)								
c	SETDA (BAGIAN UMUM)	15,229,768,550.00							15,229,768,550.00
d	SETDA (BAGIAN HUMAS)								
e	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)								
f	SETDA (BAGIAN HUKUM)								
g	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)								
h	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)								
24	SEKRETARIAT DPRD	4,706,626,338.00							4,706,626,338.00
25	KECAMATAN REMBANG	5,737,821,800.00							5,737,821,800.00
26	KECAMATAN KALIORI	2,304,363,400.00							2,304,363,400.00
27	KECAMATAN SULANG	2,299,972,250.00							2,299,972,250.00
28	KECAMATAN SUMBER	2,198,830,500.00							2,198,830,500.00
29	KECAMATAN BULU	2,091,557,800.00							2,091,557,800.00
30	KECAMATAN LASEM	2,421,238,850.00							2,421,238,850.00
31	KECAMATAN PANCUR	2,436,189,100.00							2,436,189,100.00
32	KECAMATAN SLUKE	1,544,609,200.00							1,544,609,200.00
33	KECAMATAN PAMOTAN	1,870,432,250.00							1,870,432,250.00
34	KECAMATAN GUNEM	1,724,823,900.00							1,724,823,900.00
35	KECAMATAN SALE	1,738,018,250.00							1,738,018,250.00
36	KECAMATAN KRAGAN	2,513,109,238.00							2,513,109,238.00
37	KECAMATAN SEDAN	2,201,440,250.00							2,201,440,250.00
38	KECAMATAN SARANG	2,467,538,100.00							2,467,538,100.00
39	INSPEKTORAT	4,558,777,850.00							4,558,777,850.00
40	BAPPEDA	3,673,469,700.00							3,673,469,700.00
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	15,617,406,958.00							15,617,406,958.00
a	(SKPD)	15,617,406,958.00							15,617,406,958.00
b	(PPKD)								
42	BKD	4,171,069,950.00							4,171,069,950.00
	JUMLAH	693,272,542,605.00	1,131,632,000.00	11,944,474,900.00	48,064,900,000.00	7,284,860,000.00	381,339,509,700.00	1,000,000,000.00	1,144,037,719,205.00

BELANJA
REKAPITULASI BELANJA TIDAK L/

NO.	ORGANISASI	Jumlah (Rp)							
		RANCANGAN KUA PERUBAHAN 2019							
		Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten /Kota dan Pemerintah Desa	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	Belanja Tidak Terduga	Jumlah
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18 = 11+12+13+14+15+16+17
1	DINPENDIKPORA	415,345,683,648.00			23,595,500,000.00				438,941,183,648.00
2	DINAS KESEHATAN	53,855,829,452.00					5,050,000,000.00		58,905,829,452.00
3	RSUD dr R. SOETRASNO	27,062,296,325.00	1,131,632,000.00						28,193,928,325.00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8,461,285,319.00							8,461,285,319.00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5,094,132,179.00			3,097,792,000.00	6,092,500,000.00			14,284,424,179.00
6	SATPOL PP	6,472,649,393.00							6,472,649,393.00
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1,328,390,049.00			800,000,000.00		1,090,956,000.00		3,219,346,049.00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3,098,123,731.00							3,098,123,731.00
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	5,270,378,073.00			150,000,000.00	1,372,160,000.00			6,792,538,073.00
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	4,825,695,281.00							4,825,695,281.00
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	12,806,103,426.00			6,898,000,000.00				19,704,103,426.00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8,442,005,921.00							8,442,005,921.00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3,250,144,338.00							3,250,144,338.00
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3,455,779,809.00		15,499,474,900.00			374,893,553,700.00		393,848,808,409.00
15	DINAS PERHUBUNGAN	5,301,683,436.00							5,301,683,436.00
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2,612,710,728.00			25,000,000.00				2,637,710,728.00
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	2,744,552,865.00			160,000,000.00				2,904,552,865.00
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2,690,799,903.00							2,690,799,903.00
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3,688,354,148.00			1,765,000,000.00				5,453,354,148.00
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	10,434,837,890.00			165,000,000.00				10,699,837,890.00
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	21,213,274,000.00							21,213,274,000.00
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	770,756,324.00							770,756,324.00
23	SETDA	15,201,656,012.00			19,187,000,000.00	500,000,000.00	7,786,000,000.00		42,674,656,012.00
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)				18,012,000,000.00	500,000,000.00			18,512,000,000.00
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)								
c	SETDA (BAGIAN UMUM)	15,201,656,012.00							15,201,656,012.00
d	SETDA (BAGIAN HUMAS)				1,175,000,000.00		7,786,000,000.00		8,961,000,000.00
e	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)								
f	SETDA (BAGIAN HUKUM)								
g	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)								
h	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)								
24	SEKRETARIAT DPRD	4,669,402,442.00							4,669,402,442.00
25	KECAMATAN REMBANG	5,925,978,669.00							5,925,978,669.00
26	KECAMATAN KALIORI	2,197,389,706.00							2,197,389,706.00
27	KECAMATAN SULANG	2,038,315,616.00							2,038,315,616.00
28	KECAMATAN SUMBER	1,980,376,895.00							1,980,376,895.00
29	KECAMATAN BULU	1,826,913,497.00							1,826,913,497.00
30	KECAMATAN LASEM	2,313,334,620.00							2,313,334,620.00
31	KECAMATAN PANCUR	2,058,174,207.00							2,058,174,207.00
32	KECAMATAN SLUKE	1,612,199,136.00							1,612,199,136.00
33	KECAMATAN PAMOTAN	1,683,852,659.00							1,683,852,659.00
34	KECAMATAN GUNEM	1,582,178,054.00							1,582,178,054.00
35	KECAMATAN SALE	1,715,598,330.00							1,715,598,330.00
36	KECAMATAN KRAGAN	2,044,404,323.00							2,044,404,323.00
37	KECAMATAN SEDAN	1,910,612,681.00							1,910,612,681.00
38	KECAMATAN SARANG	2,408,604,080.00							2,408,604,080.00
39	INSPEKTORAT	4,104,779,083.00							4,104,779,083.00
40	BAPPEDA	3,635,155,011.00							3,635,155,011.00
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	15,757,340,291.00						1,276,864,623.00	17,034,204,914.00
a	(SKPD)								
b	(PPKD)								
42	BKD	4,275,598,429.00							4,275,598,429.00
	JUMLAH	687,167,329,979.00	1,131,632,000.00	15,499,474,900.00	55,843,292,000.00	7,864,660,000.00	388,820,509,700.00	1,276,864,623.00	1,157,703,763,202.00

BELANJA
REKAPITULASI BELANJA TIDAK LA

NO.	ORGANISASI	JUMLAH (Rp)							
		BERTAMBAH / (BERKURANG)							
		Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupate n/Kota dan Pemerintah Desa	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupate n/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	Belanja Tidak Terduga	JUMLAH
1	2	19 = 11-3	20 = 12-4	21 = 13-5	22 = 14-6	23 = 15-7	24 = 16-8	25 = 17-9	26=19+20+21+22+23 +24+25
1	DINPENDIKPORA	(4,363,363,577.00)	-	-	518,600,000.00	-	-	-	(3,844,763,577.00)
2	DINAS KESEHATAN	544,896,811.00	-	-	-	-	-	-	544,896,811.00
3	RSUD dr R. SOETRASNO	144,051,025.00	-	-	-	-	-	-	144,051,025.00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	(61,667,831.00)	-	-	-	-	-	-	(61,667,831.00)
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	167,674,429.00	-	-	122,792,000.00	680,000,000.00	-	-	960,466,429.00
6	SATPOL PP	149,071,193.00	-	-	-	-	-	-	149,071,193.00
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	(155,337,851.00)	-	-	70,000,000.00	-	-	-	(85,337,851.00)
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	108,352,681.00	-	-	-	-	-	-	108,352,681.00
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	109,717,823.00	-	-	150,000,000.00	-	-	-	259,717,823.00
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	(117,810,369.00)	-	-	-	-	-	-	(117,810,369.00)
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	(973,463,724.00)	-	-	483,000,000.00	-	-	-	(490,463,724.00)
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	167,780,371.00	-	-	-	-	-	-	167,780,371.00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	(184,745,895.00)	-	-	-	-	-	-	(184,745,895.00)
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	(83,692,941.00)	-	3,555,000,000.00	-	-	(305,000,000.00)	-	3,166,307,059.00
15	DINAS PERHUBUNGAN	(346,221,914.00)	-	-	-	-	-	-	(346,221,914.00)
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	223,903,778.00	-	-	25,000,000.00	-	-	-	248,903,778.00
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	(69,325,735.00)	-	-	75,000,000.00	-	-	-	5,674,265.00
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	(192,565,697.00)	-	-	-	-	-	-	(192,565,697.00)
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	2,737,648.00	-	-	1,175,000,000.00	-	-	-	1,177,737,648.00
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	72,175,868.00	-	-	40,000,000.00	-	-	-	112,175,868.00
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	1,328,393,000.00	-	-	-	-	-	-	1,328,393,000.00
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	(571,226.00)	-	-	-	-	-	-	(571,226.00)
23	SETDA	(28,112,538.00)	-	-	5,119,000,000.00	-	7,786,000,000.00	-	12,876,887,462.00
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	-	-	-	3,944,000,000.00	-	-	-	3,944,000,000.00
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	-	-	-	-	-	-	-	-
c	SETDA (BAGIAN UMUM)	(28,112,538.00)	-	-	-	-	-	-	(28,112,538.00)
d	SETDA (BAGIAN HUMAS)	-	-	-	-	-	-	-	-
e	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	-	-	-	1,175,000,000.00	-	7,786,000,000.00	-	8,961,000,000.00
f	SETDA (BAGIAN HUKUM)	-	-	-	-	-	-	-	-
g	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	-	-	-	-	-	-	-	-
h	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	-	-	-	-	-	-	-	-
24	SEKRETARIAT DPRD	(37,223,896.00)	-	-	-	-	-	-	(37,223,896.00)
25	KECAMATAN REMBANG	188,156,869.00	-	-	-	-	-	-	188,156,869.00
26	KECAMATAN KALIORI	(106,973,694.00)	-	-	-	-	-	-	(106,973,694.00)
27	KECAMATAN SULANG	(261,656,634.00)	-	-	-	-	-	-	(261,656,634.00)
28	KECAMATAN SUMBER	(218,453,605.00)	-	-	-	-	-	-	(218,453,605.00)
29	KECAMATAN BULU	(264,644,303.00)	-	-	-	-	-	-	(264,644,303.00)
30	KECAMATAN LASEM	(107,904,230.00)	-	-	-	-	-	-	(107,904,230.00)
31	KECAMATAN PANCUR	(378,014,893.00)	-	-	-	-	-	-	(378,014,893.00)
32	KECAMATAN SLUKE	67,589,936.00	-	-	-	-	-	-	67,589,936.00
33	KECAMATAN PAMOTAN	(186,579,591.00)	-	-	-	-	-	-	(186,579,591.00)
34	KECAMATAN GUNEM	(142,645,846.00)	-	-	-	-	-	-	(142,645,846.00)
35	KECAMATAN SALE	(22,419,920.00)	-	-	-	-	-	-	(22,419,920.00)
36	KECAMATAN KRAGAN	(468,704,915.00)	-	-	-	-	-	-	(468,704,915.00)
37	KECAMATAN SEDAN	(290,827,569.00)	-	-	-	-	-	-	(290,827,569.00)
38	KECAMATAN SARANG	(58,934,020.00)	-	-	-	-	-	-	(58,934,020.00)
39	INSPEKTORAT	(453,998,767.00)	-	-	-	-	-	-	(453,998,767.00)
40	BAPPEDA	(38,314,689.00)	-	-	-	-	-	-	(38,314,689.00)
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	139,933,333.00	-	-	-	-	-	276,864,623.00	416,797,956.00
a	(SKPD)	139,933,333.00	-	-	-	-	-	-	139,933,333.00
b	(PPKD)	-	-	-	-	-	-	276,864,623.00	276,864,623.00
42	BKD	104,528,479.00	-	-	-	-	-	-	104,528,479.00
	JUMLAH	(8,105,212,626.00)	-	3,555,000,000.00	7,778,392,000.00	680,000,000.00	7,481,000,000.00	276,864,623.00	13,666,043,997.00

BELANJA
REKAPITULASI BELANJA TIDAK L/

NO.	ORGANISASI	PEMBAHASAN							JUMLAH
		PERSETUJUAN							
		Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten /Kota dan Pemerintah Desa	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	Belanja Tidak Terduga	
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34 = 27+28+29+30+31+32+33
1	DINPENDIKPORA	408,061,023,648.00			23,695,500,000.00		5,050,000,000.00		431,756,523,648.00
2	DINAS KESEHATAN	53,855,829,452.00							58,905,829,452.00
3	RSUD dr R. SOETRASNO	27,062,296,325.00	1,631,632,000.00						28,693,928,325.00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8,461,285,319.00							8,461,285,319.00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5,094,132,179.00			3,097,792,000.00	6,222,500,000.00			14,414,424,179.00
6	SATPOL PP	6,472,649,393.00					1,090,956,000.00		6,472,649,393.00
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1,328,390,049.00			760,000,000.00				3,179,346,049.00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3,098,123,731.00							3,098,123,731.00
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	5,270,378,073.00			150,000,000.00	1,372,160,000.00			6,792,538,073.00
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	4,825,695,281.00							4,825,695,281.00
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	12,806,103,426.00			6,278,000,000.00				19,084,103,426.00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8,442,005,921.00							8,442,005,921.00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3,250,144,338.00							3,250,144,338.00
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3,455,779,809.00		16,684,474,900.00			374,498,553,700.00		394,638,808,409.00
15	DINAS PERHUBUNGAN	5,301,683,436.00							5,301,683,436.00
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2,612,710,728.00							2,612,710,728.00
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	2,744,552,865.00			140,000,000.00				2,884,552,865.00
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2,690,799,903.00							2,690,799,903.00
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3,688,354,148.00			1,530,000,000.00				5,218,354,148.00
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	10,434,837,890.00			165,000,000.00				10,599,837,890.00
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	21,213,274,000.00							21,213,274,000.00
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	770,756,324.00			19,542,000,000.00	500,000,000.00	7,786,000,000.00		770,756,324.00
23	SETDA	15,201,656,012.00			18,167,000,000.00	500,000,000.00			43,029,656,012.00
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)								18,667,000,000.00
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)								
c	SETDA (BAGIAN UMUM)	15,201,656,012.00							15,201,656,012.00
d	SETDA (BAGIAN HUMAS)				1,375,000,000.00		7,786,000,000.00		9,161,000,000.00
e	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)								
f	SETDA (BAGIAN HUKUM)								
g	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)								
h	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)								
24	SEKRETARIAT DPRD	4,669,402,442.00							4,669,402,442.00
25	KECAMATAN REMBANG	5,925,978,669.00							5,925,978,669.00
26	KECAMATAN KALIORI	2,197,389,706.00							2,197,389,706.00
27	KECAMATAN SULANG	2,038,315,616.00							2,038,315,616.00
28	KECAMATAN SUMBER	1,980,376,895.00							1,980,376,895.00
29	KECAMATAN BULU	1,826,913,497.00							1,826,913,497.00
30	KECAMATAN LASEM	2,313,334,620.00							2,313,334,620.00
31	KECAMATAN PANCUR	2,058,174,207.00							2,058,174,207.00
32	KECAMATAN SLUKE	1,612,199,136.00							1,612,199,136.00
33	KECAMATAN PAMOTAN	1,683,852,659.00							1,683,852,659.00
34	KECAMATAN GUNEM	1,582,178,054.00							1,582,178,054.00
35	KECAMATAN SALE	1,715,598,330.00							1,715,598,330.00
36	KECAMATAN KRAGAN	2,044,404,323.00							2,044,404,323.00
37	KECAMATAN SEDAN	1,910,612,681.00							1,910,612,681.00
38	KECAMATAN SARANG	2,408,604,080.00							2,408,604,080.00
39	INSPEKTORAT	4,104,779,083.00							4,104,779,083.00
40	BAPPEDA	3,635,155,011.00						1,276,864,623.00	3,635,155,011.00
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	15,709,600,345.19							15,709,600,345.19
a	(SKPD)	15,709,600,345.19							15,709,600,345.19
b	(PPKD)								
42	BKD	4,275,598,429.00							4,275,598,429.00
JUMLAH		679,834,930,033.19	1,631,632,000.00	16,684,474,900.00	55,358,292,000.00	8,094,660,000.00	388,425,509,700.00	1,276,864,623.00	1,151,308,363,256.19

BELANJA
REKAPITULASI BELANJA TIDAK L

NO.	ORGANISASI	HASIL PEMBAHASAN BERTAMBAH (BERKURANG)							
		Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupate n/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	Belanja Tidak Terduga	JUMLAH
1	2	35 = 27-3	36 = 28-4	37 = 29-5	38 = 30-6	39 = 31-7	40 = 32-8	41 = 33-9	42 = 35+36+37+38+39+40 +41
1	DINPENDIKPORA	(11,648,023,577.00)	-	-	618,600,000.00	-	-	-	(11,029,423,577.00)
2	DINAS KESEHATAN	544,896,811.00	-	-	-	-	-	-	544,896,811.00
3	RSUD dr R. SOETRASNO	144,051,025.00	500,000,000.00	-	-	-	-	-	644,051,025.00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	(61,667,831.00)	-	-	-	-	-	-	(61,667,831.00)
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	157,674,429.00	-	-	122,792,000.00	810,000,000.00	-	-	1,090,466,429.00
6	SATPOL PP	149,071,193.00	-	-	-	-	-	-	149,071,193.00
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	(155,337,851.00)	-	-	30,000,000.00	-	-	-	(125,337,851.00)
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	108,352,681.00	-	-	-	-	-	-	108,352,681.00
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	109,717,823.00	-	-	150,000,000.00	-	-	-	259,717,823.00
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	(117,810,369.00)	-	-	-	-	-	-	(117,810,369.00)
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	(973,463,724.00)	-	-	(137,000,000.00)	-	-	-	(1,110,463,724.00)
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	167,780,371.00	-	-	-	-	-	-	167,780,371.00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	(184,745,895.00)	-	-	-	-	-	-	(184,745,895.00)
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	(83,692,941.00)	-	4,740,000,000.00	-	-	(700,000,000.00)	-	3,956,307,059.00
15	DINAS PERHUBUNGAN	(346,221,914.00)	-	-	-	-	-	-	(346,221,914.00)
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	223,903,778.00	-	-	-	-	-	-	223,903,778.00
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	(69,325,735.00)	-	-	55,000,000.00	-	-	-	(14,325,735.00)
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	(192,565,697.00)	-	-	-	-	-	-	(192,565,697.00)
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	2,737,648.00	-	-	940,000,000.00	-	-	-	942,737,648.00
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	72,175,868.00	-	-	40,000,000.00	-	-	-	112,175,868.00
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	1,328,393,000.00	-	-	-	-	-	-	1,328,393,000.00
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	(571,226.00)	-	-	-	-	-	-	(571,226.00)
23	SETDA	(28,112,538.00)	-	-	5,474,000,000.00	-	7,786,000,000.00	-	13,231,887,462.00
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	-	-	-	4,099,000,000.00	-	-	-	4,099,000,000.00
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	-	-	-	-	-	-	-	-
c	SETDA (BAGIAN UMUM)	(28,112,538.00)	-	-	-	-	-	-	(28,112,538.00)
d	SETDA (BAGIAN HUMAS)	-	-	-	-	-	-	-	-
e	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	-	-	-	1,375,000,000.00	-	7,786,000,000.00	-	9,161,000,000.00
f	SETDA (BAGIAN HUKUM)	-	-	-	-	-	-	-	-
g	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	-	-	-	-	-	-	-	-
h	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	-	-	-	-	-	-	-	-
24	SEKRETARIAT DPRD	(37,223,896.00)	-	-	-	-	-	-	(37,223,896.00)
25	KECAMATAN REMBANG	188,156,869.00	-	-	-	-	-	-	188,156,869.00
26	KECAMATAN KALIORI	(106,973,694.00)	-	-	-	-	-	-	(106,973,694.00)
27	KECAMATAN SULANG	(261,656,634.00)	-	-	-	-	-	-	(261,656,634.00)
28	KECAMATAN SUMBER	(218,453,605.00)	-	-	-	-	-	-	(218,453,605.00)
29	KECAMATAN BULU	(264,644,303.00)	-	-	-	-	-	-	(264,644,303.00)
30	KECAMATAN LASEM	(107,904,230.00)	-	-	-	-	-	-	(107,904,230.00)
31	KECAMATAN PANCUR	(378,014,893.00)	-	-	-	-	-	-	(378,014,893.00)
32	KECAMATAN SLUKE	67,589,936.00	-	-	-	-	-	-	67,589,936.00
33	KECAMATAN PAMOTAN	(186,579,591.00)	-	-	-	-	-	-	(186,579,591.00)
34	KECAMATAN GUNEM	(142,645,846.00)	-	-	-	-	-	-	(142,645,846.00)
35	KECAMATAN SALE	(22,419,920.00)	-	-	-	-	-	-	(22,419,920.00)
36	KECAMATAN KRAGAN	(468,704,915.00)	-	-	-	-	-	-	(468,704,915.00)
37	KECAMATAN SEDAN	(290,827,569.00)	-	-	-	-	-	-	(290,827,569.00)
38	KECAMATAN SARANG	(58,934,020.00)	-	-	-	-	-	-	(58,934,020.00)
39	INSPEKTORAT	(453,998,767.00)	-	-	-	-	-	-	(453,998,767.00)
40	BAPPEDA	(38,314,689.00)	-	-	-	-	-	-	(38,314,689.00)
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	92,193,387.19	-	-	-	-	-	276,864,623.00	369,058,010.19
a	(SKPD)	92,193,387.19	-	-	-	-	-	276,864,623.00	92,193,387.19
b	(PPKD)	-	-	-	-	-	-	-	276,864,623.00
42	BKD	104,528,479.00	-	-	-	-	-	-	104,528,479.00
JUMLAH		(13,437,612,571.81)	500,000,000.00	4,740,000,000.00	7,293,392,000.00	810,000,000.00	7,086,000,000.00	276,864,623.00	7,268,644,051.19

BELANJA
REKAPITULASI BELANJA TIDAK L/

NO.	ORGANISASI	HASIL PEMBAHASAN							
		BERTAMBAH (BERKURANG)							
		Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	Belanja Tidak Terduga	JUMLAH
1	2	43 = 27-11	44 = 28-12	45 = 29-13	46 = 30-14	47 = 31-15	48 = 32-16	49 = 33-17	50 = 43+44+45+46+47+48+49
1	DINPENDIKPORA	(7,284,660,000.00)	-	-	100,000,000.00	-	-	-	(7,184,660,000.00)
2	DINAS KESEHATAN	-	-	-	-	-	-	-	-
3	RSUD dr R. SOETRASNO	-	500,000,000.00	-	-	-	-	-	500,000,000.00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	-	-	-	-	-	-	-
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	-	-	130,000,000.00	-	-	130,000,000.00
6	SATPOL PP	-	-	-	-	-	-	-	-
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	-	-	(40,000,000.00)	-	-	-	(40,000,000.00)
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	-	-	-	-	-	-
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	-	-	-	(620,000,000.00)	-	-	-	(620,000,000.00)
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-	-	-	-	-
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-	-	-	-	-	-
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	1,185,000,000.00	-	-	(395,000,000.00)	-	790,000,000.00
15	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	(25,000,000.00)	-	-	-	(25,000,000.00)
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	(20,000,000.00)	-	-	-	(20,000,000.00)
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	-	-	-	-	-	-	-	-
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	-	-	(235,000,000.00)	-	-	-	(235,000,000.00)
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	-	-	-	-	-	-
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	-	-	-	-	-	-	-	-
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-	355,000,000.00	-	-	-	355,000,000.00
23	SETDA	-	-	-	155,000,000.00	-	-	-	155,000,000.00
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	-	-	-	-	-	-	-	-
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	-	-	-	-	-	-	-	-
c	SETDA (BAGIAN UMUM)	-	-	-	-	-	-	-	-
d	SETDA (BAGIAN HUMAS)	-	-	-	-	-	-	-	-
e	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	-	-	-	200,000,000.00	-	-	-	200,000,000.00
f	SETDA (BAGIAN HUKUM)	-	-	-	-	-	-	-	-
g	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	-	-	-	-	-	-	-	-
h	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	-	-	-	-	-	-	-	-
24	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-
25	KECAMATAN REMBANG	-	-	-	-	-	-	-	-
26	KECAMATAN KALIORI	-	-	-	-	-	-	-	-
27	KECAMATAN SULANG	-	-	-	-	-	-	-	-
28	KECAMATAN SUMBER	-	-	-	-	-	-	-	-
29	KECAMATAN BULU	-	-	-	-	-	-	-	-
30	KECAMATAN LASEM	-	-	-	-	-	-	-	-
31	KECAMATAN PANCUR	-	-	-	-	-	-	-	-
32	KECAMATAN SLUKE	-	-	-	-	-	-	-	-
33	KECAMATAN PAMOTAN	-	-	-	-	-	-	-	-
34	KECAMATAN GUNEM	-	-	-	-	-	-	-	-
35	KECAMATAN SALE	-	-	-	-	-	-	-	-
36	KECAMATAN KRAGAN	-	-	-	-	-	-	-	-
37	KECAMATAN SEDAN	-	-	-	-	-	-	-	-
38	KECAMATAN SARANG	-	-	-	-	-	-	-	-
39	INSPEKTORAT	-	-	-	-	-	-	-	(47,739,945.81)
40	BAPPEDA	-	-	-	-	-	-	-	-
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	(47,739,945.81)	-	-	-	-	-	-	(47,739,945.81)
a	(SKPD)	(47,739,945.81)	-	-	-	-	-	-	-
b	(PPKD)	-	-	-	-	-	-	-	-
42	BKD	-	-	-	(495,000,000.00)	130,000,000.00	(395,000,000.00)	-	(6,397,399,945.81)
	JUMLAH	(7,332,399,945.81)	500,000,000.00	1,185,000,000.00	(495,000,000.00)	130,000,000.00	(395,000,000.00)	-	(6,397,399,945.81)

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG

NO.	SKPD	APBD INDUK 2019	RANCANGAN KUPA PPAS PERUBAHAN 2019	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5 = 4-3
1	DINPENDIKPORA	99,526,937,850.00	152,963,250,738.00	53,436,312,888.00
2	DINAS KESEHATAN	92,360,724,600.00	97,467,002,370.00	5,106,277,770.00
3	RSUD dr R. SOETRASNO	100,719,696,000.00	106,148,819,392.04	5,429,123,392.04
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	81,201,165,000.00	97,139,108,400.00	15,937,943,400.00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	17,655,939,440.00	12,900,549,640.00	(4,755,389,800.00)
6	SATPOL PP	7,461,556,000.00	5,553,456,000.00	(1,908,100,000.00)
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1,532,100,000.00	1,542,408,000.00	10,308,000.00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5,034,100,000.00	5,012,100,000.00	(22,000,000.00)
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	12,829,964,000.00	12,884,964,000.00	55,000,000.00
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	5,016,070,000.00	4,966,070,000.00	(50,000,000.00)
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	50,037,244,519.00	47,684,844,519.00	(2,352,400,000.00)
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	7,574,400,000.00	8,009,550,000.00	435,150,000.00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3,183,786,000.00	3,183,786,000.00	-
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4,303,306,000.00	5,273,306,000.00	970,000,000.00
15	DINAS PERHUBUNGAN	16,965,780,000.00	15,690,780,000.00	(1,275,000,000.00)
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5,800,290,000.00	5,422,297,000.00	(377,993,000.00)
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	5,537,805,000.00	8,602,805,000.00	3,065,000,000.00
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	10,637,700,000.00	10,574,595,000.00	(63,105,000.00)
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	15,185,608,000.00	15,179,612,700.00	(5,995,300.00)
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	14,930,272,000.00	15,541,997,000.00	611,725,000.00
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		-	-
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI		-	-
23	SETDA	33,771,080,000.00	37,463,080,000.00	3,692,000,000.00
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	15,526,000,000.00	17,196,000,000.00	1,670,000,000.00
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	778,580,000.00	928,580,000.00	150,000,000.00
c	SETDA (BAGIAN UMUM)	7,103,000,000.00	7,665,000,000.00	562,000,000.00
d	SETDA (BAGIAN HUMAS)	4,245,000,000.00	4,255,000,000.00	10,000,000.00
e	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	2,005,200,000.00	2,005,200,000.00	-
f	SETDA (BAGIAN HUKUM)	945,000,000.00	1,045,000,000.00	100,000,000.00
g	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	2,063,300,000.00	3,163,300,000.00	1,100,000,000.00
h	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	1,105,000,000.00	1,205,000,000.00	100,000,000.00
21	SEKRETARIAT DPRD	38,919,572,000.00	37,922,885,000.00	(996,687,000.00)
25	KECAMATAN REMBANG	4,087,146,600.00	6,830,862,600.00	2,743,716,000.00
26	KECAMATAN KALIORI	847,890,000.00	894,890,000.00	47,000,000.00
27	KECAMATAN SULANG	1,016,450,000.00	1,163,450,000.00	147,000,000.00
28	KECAMATAN SUMBER	660,072,500.00	702,572,500.00	42,500,000.00
29	KECAMATAN BULU	814,924,000.00	857,424,000.00	42,500,000.00
30	KECAMATAN LASEM	879,590,000.00	925,090,000.00	45,500,000.00
31	KECAMATAN PANCUR	746,360,000.00	796,360,000.00	50,000,000.00
32	KECAMATAN SLUKE	768,147,500.00	807,647,500.00	39,500,000.00
33	KECAMATAN PAMOTAN	841,600,000.00	887,100,000.00	45,500,000.00
34	KECAMATAN GUNEM	674,560,000.00	725,060,000.00	50,500,000.00
35	KECAMATAN SALE	811,764,000.00	899,439,000.00	87,675,000.00
36	KECAMATAN KRAGAN	1,632,088,500.00	1,657,963,500.00	25,875,000.00
37	KECAMATAN SEDAN	739,839,000.00	839,389,000.00	99,550,000.00
38	KECAMATAN SARANG	1,398,250,000.00	1,403,225,000.00	4,975,000.00
39	INSPEKTORAT	6,324,470,000.00	7,279,470,000.00	955,000,000.00
40	BAPPEDA	7,520,000,000.00	7,663,481,340.15	143,481,340.15
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	15,971,113,000.00	16,710,243,156.00	739,130,156.00
a	(SKPD)	15,971,113,000.00	16,710,243,156.00	739,130,156.00
b	(PPKD)			-
42	BKD	7,551,270,200.00	7,349,719,000.00	(201,551,200.00)
	JUMLAH	683,470,631,709.00	765,520,653,355.19	82,050,021,646.19

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG

NO.	SKPD	PEMBAHASAN		
		PERSETUJUAN	BERTAMBAH (BERKURANG) DARI INDUK 2019	BERTAMBAH (BERKURANG) DARI USULAN PERUBAHAN
1	2	6	8 = 6-3	8 = 6-4
1	DINPENDIKPORA	153,065,750,738.00	53,538,812,888.00	102,500,000.00
2	DINAS KESEHATAN	100,501,267,370.00	8,140,542,770.00	3,034,265,000.00
3	RSUD dr R. SOETRASNO	110,648,819,392.00	9,929,123,392.00	4,499,999,999.96
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	99,639,108,400.00	18,437,943,400.00	2,500,000,000.00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	12,890,549,640.00	(4,765,389,800.00)	(10,000,000.00)
6	SATPOL PP	5,583,456,000.00	(1,878,100,000.00)	30,000,000.00
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1,542,408,000.00	10,308,000.00	-
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5,212,100,000.00	178,000,000.00	200,000,000.00
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	12,829,964,000.00	-	(55,000,000.00)
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	4,966,070,000.00	(50,000,000.00)	-
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	48,629,844,519.00	(1,407,400,000.00)	945,000,000.00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8,189,550,000.00	615,150,000.00	180,000,000.00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3,183,786,000.00	-	-
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5,405,806,000.00	1,102,500,000.00	132,500,000.00
15	DINAS PERHUBUNGAN	15,640,780,000.00	(1,325,000,000.00)	(50,000,000.00)
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5,429,797,000.00	(370,493,000.00)	7,500,000.00
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	8,717,805,000.00	3,180,000,000.00	115,000,000.00
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	10,574,595,000.00	(63,105,000.00)	-
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	15,179,612,700.00	(5,995,300.00)	-
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	15,857,497,000.00	927,225,000.00	315,500,000.00
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-
23	SETDA	38,685,080,000.00	4,914,000,000.00	1,222,000,000.00
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	17,206,000,000.00	1,680,000,000.00	10,000,000.00
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	978,580,000.00	200,000,000.00	50,000,000.00
c	SETDA (BAGIAN UMUM)	7,790,000,000.00	687,000,000.00	125,000,000.00
d	SETDA (BAGIAN HUMAS)	4,255,000,000.00	10,000,000.00	-
e	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	2,005,200,000.00	-	-
f	SETDA (BAGIAN HUKUM)	1,095,000,000.00	150,000,000.00	50,000,000.00
g	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	4,150,300,000.00	2,087,000,000.00	987,000,000.00
h	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	1,205,000,000.00	100,000,000.00	-
21	SEKRETARIAT DPRD	37,922,885,000.00	(996,687,000.00)	-
25	KECAMATAN REMBANG	6,880,862,600.00	2,793,716,000.00	50,000,000.00
26	KECAMATAN KALIORI	894,890,000.00	47,000,000.00	-
27	KECAMATAN SULANG	1,143,450,000.00	127,000,000.00	(20,000,000.00)
28	KECAMATAN SUMBER	702,572,500.00	42,500,000.00	-
29	KECAMATAN BULU	877,424,000.00	62,500,000.00	20,000,000.00
30	KECAMATAN LASEM	925,090,000.00	45,500,000.00	-
31	KECAMATAN PANCUR	796,360,000.00	50,000,000.00	-
32	KECAMATAN SLUKE	807,647,500.00	39,500,000.00	-
33	KECAMATAN PAMOTAN	887,100,000.00	45,500,000.00	-
34	KECAMATAN GUNEM	725,060,000.00	50,500,000.00	-
35	KECAMATAN SALE	899,439,000.00	87,675,000.00	-
36	KECAMATAN KRAGAN	1,657,963,500.00	25,875,000.00	-
37	KECAMATAN SEDAN	839,389,000.00	99,550,000.00	-
38	KECAMATAN SARANG	1,433,225,000.00	34,975,000.00	30,000,000.00
39	INSPEKTORAT	7,679,470,000.00	1,355,000,000.00	400,000,000.00
40	BAPPEDA	7,905,981,340.00	385,981,340.00	242,499,999.85
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	16,657,743,156.00	686,630,156.00	(52,500,000.00)
a	(SKPD)	16,657,743,156.00	686,630,156.00	(52,500,000.00)
b	(PPKD)	-	-	-
42	BKD	7,617,119,000.00	65,848,800.00	267,400,000.00
	JUMLAH	779,627,318,355.00	96,156,686,646.00	14,106,664,999.81

V. PENUTUP

Demikian Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas Rancangan KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2019, selanjutnya sebagai bahan pertimbangan dalam Persetujuan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.

Rembang, 30 Juli 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

BADAN ANGGARAN

Ketua,

Sekretaris,

ttd

ttd

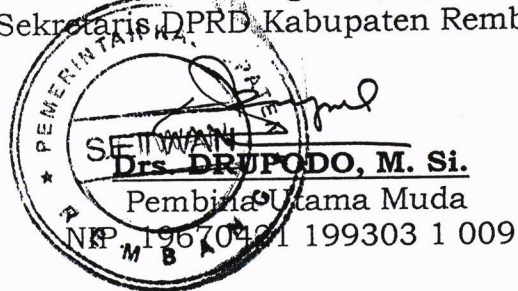
H. MAJID KAMIL.M.Z

Drs. DRUPODO, M. Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670421 199303 1 009

Sesuai dengan aslinya
Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang



**RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG
TERKAIT PERSETUJUAN KUPA/ PPAS PERUBAHAN TAHUN 2019**

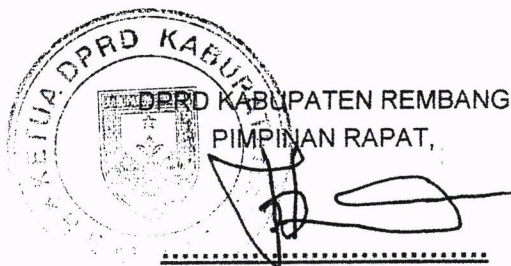
**HARI/TANGGAL : SELASA, 10 JULI 2019
PUKUL : 10.00 WIB**

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD	1	
2	SUGIHARTO	Anggota	2	
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota	3	
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	4	
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	5	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6	
7	HENRY PURWOKO, S.Pd.	Anggota	7	
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota	8	
9	H. SUPADI	Anggota	9	
10	NUR HASYIM	Anggota	10	
	FRAKSI DEMOKRAT			
11	H. GUNASIH, S.E.	Wakil Ketua DPRD	11	
12	IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E, M.H.	Anggota	12	
13	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	13	
14	EKA SISWA KARTIKA	Anggota	14	
15	H. ISLAHUDDIN	Anggota	15	
16	H. HARNO, S.E.	Anggota	16	
17	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	17	
18	MOHAMMAD HARIYADI	Anggota	18	
	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	19	
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota	20	
21	ILYAS	Anggota	21	
22	SHOLEH, B.A	Anggota	22	
23	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi.	Anggota	23	
24	Drs. H. MUH. SUBAWOTO	Anggota	24	

	FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM		
25	SUMARSIH	Wakil Ketua DPRD	25
26	JASMANI	Anggota	26
27	WIDODO	Anggota	27
28	ALI IRCHAM, S.T.	Anggota	28
29	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	29
30	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	30
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31
32	SUSTIYONO	Anggota	32
	FRAKSI PARTAI GERINDRA		
33	HERI KURNIAWAN, S.E.	Anggota	33
33	H. CHASANUDDIN	Anggota	34
34	PUJI SANTOSO, SP, M.H.	Anggota	35
35	H. YUDianto, S.H.	Anggota	36
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37
	FRAKSI KARYA SEJAHTERA		
38	H. ISMARI, S.H.	Anggota	38
39	GATOT PAERAN, S.H, M.Si.	Anggota	39
40	H. JOKO SUPRIHADI, S.H.	Anggota	40
41	ALI IMRON WAHYUDI	Anggota	41
	FRAKSI HARAPAN		
42	SUKARMAIN	Anggota	42
43	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	43
44	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, S.Pd.	Anggota	44
45	NUR JANNAH	Anggota	45

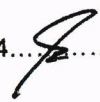
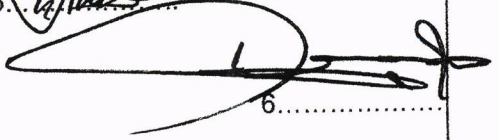
Keterangan :

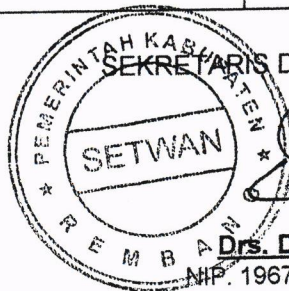
- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar



DAFTAR HADIR FORKOMPINDA
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG
TERKAIT PERSETUJUAN KUPA/ PPAS PERUBAHAN TAHUN 2019

HARI/TANGGAL : SELASA, 10 JULI 2019
PUKUL : 10.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.	Bupati Rembang	1. 
2	H.BAYU ANDRIYANTO, S.E.	Wakil Bupati Rembang	2.
3		Kejaksaan Negeri Rembang	3.
4	<i>Sri Susilawati, SH</i>	Pengadilan Negeri Rembang	4. 
5	<i>Bandan</i>	Dandim 0720 Rembang	5. 
6	<i>EKO PUJI. S, SH</i>	Kepolisian Resort Rembang	6. 
7		Pengadilan Agama Kab. Rembang	7.
8	Drs. SUBAKTI	Sekretaris Daerah	8. 

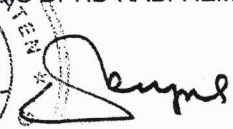


Drs. DRUPODO, M.Si
NIP. 19670421 199303 1 009

DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG
TERKAIT PERSETUJUAN KUPA/ PPAS PERUBAHAN TAHUN 2019

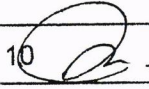
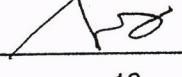
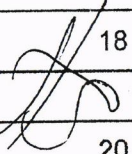
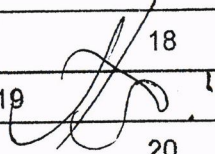
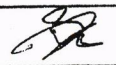
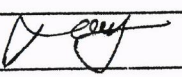
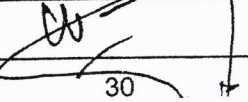
HARI/TANGGAL : SELASA, 10 JULI 2019
 PUKUL : 10.00 WIB

NO	JABATAN	NAMA	TANDATANGAN
1	CAMAT REMBANG	MUSTHOLIH	1
2	CAMAT KALIORI	Haryanto	2
3	CAMAT SUMBER		3
4	CAMAT SULANG	Slamet Haryanto	4
5	CAMAT BULU		5
6	CAMAT PAMOTAN		6
7	CAMAT GUNEM	Guliano	7
8	CAMAT SALE		8
9	CAMAT LASEM		9
10	CAMAT PANCUR	Iuhanto	10
11	CAMAT SEDAN	Isharyanto	11
12	CAMAT SLUKE		12
13	CAMAT KRAGAN	Sutarwani	13
14	CAMAT SARANG	Mutahen	14

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
 SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

Dr. DRUPODO, M.Si
 NIP. 19670421 199303 1 009

DAFTAR HADIR SKPD
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG
TERKAIT PERSETUJUAN KUPA/PPAS PERUBAHAN TAHUN 2019

HARI/TANGGAL : SELASA, 10 JULI 2019
PUKUL : 10.00 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI			1
2	STAF AHLI BUPATI			2
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA			5
6	ASISTEN II SEKDA			6
7	ASISTEN III SEKDA			7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN			8
9	BAG. HUKUM			9
10	BAG. HUMAS	Hua		10 
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	Agus Iwan +1	Agus	11 
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN			12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT	SIDI TEGUH RITANUS	ISA RAG	13 
14	BAG. ORGANISASI & KEPEGAWAIAN			14
15	BAG. UMUM			15
16	BPPKAD			16
17	INSPEKTORAT			17
18	BAPPEDA			18 
19	DINSOSP2KB	Fri wahyuni		19 
20	B K D			20
21	B P B D			21
22	DPU TATA RUANG			22
23	DINPERKIM	goestiannarni		23 
24	DINAS KESEHATAN	Darmono		24 
25	DINDIKPORA			25
26	DINPERINDAGKOP & UMKM			26
27	DINTANPAN	Suratman		27 
28	DINLUTKAN	Sofya elshia		28 
29	DINKOMINFO	Warkono		29 
30	DINAS PERHUBUNGAN	Heri Saenari	Heri Saenari	30 

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
31	DINAS DUKCAPIL	Hjoh Dheni	Kades	31
32	DINPERMADES	Puli Hri	Kaporm	32
33	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Dns Purnawo	Kades	33
34	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			34
35	KANTOR KESBANGPOLINMAS	Qur Candras	Karubbag Pu	35
36	DINAS ARSIP & PERPUSTAKAAN	Ad Bayur	Katib Klamipia	36
37	DINAS PMPTSP NAKER			37
38	RSUD dr. R. SUTRASNO			38
39	SATPOL PP	H. WILUJO	Sat Pol PP	39
40	TIM PKK KAB. REMBANG			40
41	P D A M			41
42	PERCETAKAN DAERAH			42
43	PD. BANK PASAR			43
44	BANK JATENG CAB. REMBANG			44
45	BRI CAB. REMBANG			45
46	PD BPR BKK LASEM			46
47	PT. R B S J			47
48	APOTIK DAERAH			48
49	KANTOR KEMENTRIAN AGAMA			49
50	DIPENDA PROPINSI			50
51	BPS KAB. REMBANG			51
52	RUMAH TAHANAN			52
53	PERHUTANI KPH MANTINGAN			53
54	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			54
55	KANTOR PERHUTANI SPH IV			55
56	KANTOR POS DAN GIRO			56
57	TELKOM REMBANG			57
58	PLN CAB. REMBANG			58
59	BAWASLU KAB. REMBANG			59
60	B P N KAB. REMBANG			60
61	KANTOR PAJAK			61
62	UP3AD (ASET DAERAH)			62
63	KANTOR PELABUHAN			63
64	KETUA KPII KAB. REMBANG			64

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
66	TK FKs	Ag		66
67	Launani		Palno	67
68	MALZuda			68
69	SiBIT			69
70	Juus			70
71				71
72				72
73				73
74				74
75				75
76				76
77				77
78				78
79				79
80				80
81				81
82				82
83				83
84				84
85				85
86				86
87				87
88				88
89				89
90				90
91				91
92				92
93				93
94				94
95				95
96				96
97				97
98				98
99				99

102	<i>Dasu Bonje</i>	<i>Mawo</i>	<i>Pier</i>	102 <i>Q</i>
103	<i>Radio Citra Bahari FM</i>	<i>Masudi</i>	<i>Reporter</i>	103 <i>Handwritten</i>
104				104
105				105
106				106
107				107
108				108
109				109
110				110
111				111
112				112
113				113
114				114
115				115
116				116
117				117
118				118
119				119
120				120
121				121
122				122
123				123
124				124
125				125
126				126
127				127
128				128
129				129
130				130

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

SETWAN

Handwritten Signature

Drs. DRUPODO, M.Si



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SERTA PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN APBD
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan terhadap asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi antar kegiatan dan antar jenis belanja, yang menyebabkan sisa lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun Anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Persetujuan Penetapan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2019;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Desa;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

Memperhatikan : 1. Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang Atas Rancangan KUPA-PPAS Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran pada tanggal 30 Juli 2019;

2. Pembicaraan-pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 30 Juli 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Persetujuan Penetapan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Serta Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana Diktum KESATU Keputusan ini kepada Bupati Rembang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 30 Juli 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
KETUA,


MAMUD KAMIL MZ

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DENGAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR : 019.6/ 2153/ 2019
NOMOR : 019.6/ 590 / 2019
TANGGAL : 30 Juli 2019
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH (KUPA)
TAHUN ANGGARAN 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. Abdul Hafidz, S.PdI
Jabatan : Bupati Rembang
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No. 90 Rembang
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang
2. a. Nama : H. Majid Kamil MZ.
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang
b. Nama : H. Gunasih ,S.E.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang
c. Nama : H.M. Bisri Cholil Laquf
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang
d. Nama : Sumarsih
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan APBD) diperlukan Kebijakan Umum Perubahan APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah

Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon anggaran sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD yang meliputi Perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS-P) Tahun Anggaran 2019.

Rembang, 30 Juli 2019

BUPATI REMBANG
Selaku,
PIHAK PERTAMA



H. Abdul Hafidz, S.Pd.I

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Selaku,
PIHAK KEDUA



H. Mayid Kamil MZ
KETUA

H. Gunasih, S.E.
WAKIL KETUA

H.M. Bisri Cholil Laquf
WAKIL KETUA

Sumarsih
WAKIL KETUA

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DENGAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR : 019.6 / 2152 / 2019
NOMOR : 019.6 / 593 / 2019
TANGGAL : 30 JULI 2019
TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN (PPASP) APBD TAHUN ANGGARAN 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. Abdul Hafidz, S.Pd.I
Jabatan : Bupati Rembang
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No. 90 Rembang
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang
2. a. Nama : H. Majid Kamil MZ
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang
b. Nama : H. Gunasih, S.E.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang
c. Nama : H. M. Bisri Cholil Laquf
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang
d. Nama : Sumarsih
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu disusun Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2019 yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar

penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

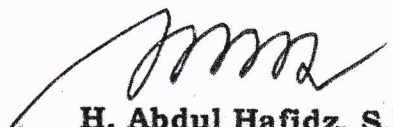
Berdasarkan hal tersebut di atas dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2019, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara program dan kegiatan, Plafon Anggaran per urusan dan Perangkat Daerah, Plafon Anggaran Sementara program dan kegiatan, Plafon Anggaran Belanja tidak langsung dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2019.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019.

Rembang, 30 Juli 2019

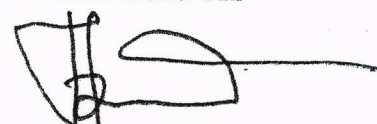
BUPATI REMBANG
Selaku,
PIHAK PERTAMA



H. Abdul Hafidz, S.Pd.I

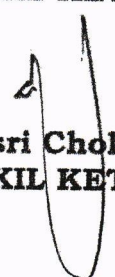
PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Selaku,
PIHAK KEDUA



H. Majid Kamil MZ.
KETUA

H. Gunasih, S.E.
WAKIL KETUA



H.M. Bisri Cholil Laquf
WAKIL KETUA

Sumarsih
WAKIL KETUA